



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 96 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA KECAMATAN SEDONG  
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana kerja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b , perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968

- tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136); ✓
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Kinerja dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) junto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6);
18. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1 );
19. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 33 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 33);
20. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 31 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN SEDONG KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.
3. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
4. Kecamatan Sedong adalah Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon.
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala Bappelitbangda adalah Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon.

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Cirebon untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2024.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
8. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
9. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2019 sampai dengan Tahun 2024.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
17. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.

18. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
19. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai.
20. Kebijakan pembangunan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan;
21. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
22. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
23. Sub kegiatan merupakan bentuk aktivitas/layanan kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan.
24. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
25. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
26. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.
27. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
28. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara

umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

## BAB II KEDUDUKAN

### Pasal 2

- (1) Renja Kecamatan Sedong Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari Renstra Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Renja Kecamatan Sedong mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Kecamatan Sedong dengan RKPD, sebagai implementasi pelaksanaan sasaran strategis jangka menengah daerah dan Renstra Kecamatan Sedong yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

## BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 3

- (1) Maksud Renja Kecamatan Sedong Tahun 2024 adalah:
  - a. sebagai dokumen perencanaan bagi Kecamatan Sedong untuk kurun waktu Tahun 2024 yang mencakup program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.
  - b. sebagai instrumen evaluasi capaian tolok ukur kinerja *impact* sasaran, *outcome* program dan *output* kegiatan berpedoman pada Renstra perangkat Daerah dan RKPD.
  - c. sebagai Instrumen evaluasi capaian tolok ukur kinerja *impact* sasaran, *outcome* program dan *output* kegiatan renja tahun sebelumnya dan capaian Renstra Kecamatan Sedong sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Tujuan ditetapkannya Renja Kecamatan Sedong Tahun 2024 adalah :
  - a. sebagai acuan dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi pemerintah daerah.
  - b. menjadi pedoman bagi Kecamatan Sedong dalam menyusun RKA Tahun 2024.

- c. menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu Tahun 2024 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

#### BAB IV SISTEMATIKA RENJA

##### Pasal 4

- (1) Renja Kecamatan Sedong Tahun 2024 disusun dengan sistematika:

##### Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Renja Kecamatan Sedong Tahun 2024.

##### Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Sedong tahun lalu dan Capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan, Reviu terhadap rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

##### Bab III Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang Telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Sedong, program dan Kegiatan.

##### Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan Indikatif Kecamatan Sedong Tahun 2024.

##### Bab V Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

- (2) Renja Kecamatan Sedong Tahun 2024 dengan sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB V PELAKSANAAN

##### Pasal 5

- (1) Kecamatan Sedong melaksanakan Renstra Tahun 2019-2024 melalui penyusunan Renja tiap tahunnya.

- (2) Kecamatan Sedong melaksanakan Renja melalui penyusunan RKA dan DPA Kecamatan Sedong Tahun 2024.
- (3) Penyusunan dan pelaksanaan RKA dan DPA Kecamatan Sedong Tahun 2024 berpedoman atau mengacu pada indikator kinerja sasaran, program dan kegiatan pembangunan dan pagu indikatif yang telah ditentukan dalam Renja Kecamatan Sedong Tahun 2024.

## BAB VI PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

### Pasal 6

- (1) Camat selaku Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pencapaian target sasaran strategis yang tercantum dalam Renja Tahun 2024 dan akan dievaluasi capaian realisasinya secara berkala paling lambat tiap triwulan.
- (2) Pejabat Administrator atau pejabat fungsional yang setara selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pencapaian target *outcome* program yang tercantum dalam Renja Tahun 2024 dan indikator kinerja kunci yang bersifat *outcome* dan akan dievaluasi capaian realisasinya secara berkala tiap bulan atau paling lambat tiap triwulan.
- (3) Evaluasi terhadap capaian realisasi indikator kinerja dampak, *outcome* dan *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) dilaporkan dan diinput melalui aplikasi Simonek dengan dilampiri atau diupload bukti pendukungnya.

### Pasal 7

- (1) Camat selaku Pengguna Anggaran wajib menyampaikan laporan realisasi capaian indikator kinerja yang tercantum dalam Renja Tahun 2024 baik secara triwulan, semester maupun akhir tahun.
- (2) Laporan realisasi capaian indikator kinerja secara rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Bappelitbangda.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 20 OKTOBER 2023

BUPATI CIREBON,



Diundangkan di Sumber

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVAI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR

Lampiran Peraturan Bupati Cirebon

Nomor : 96 Tahun 2023

Tanggal : 20 Oktober 2023

Tentang : Rencana Kerja Kecamatan Sedong Tahun 2024

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

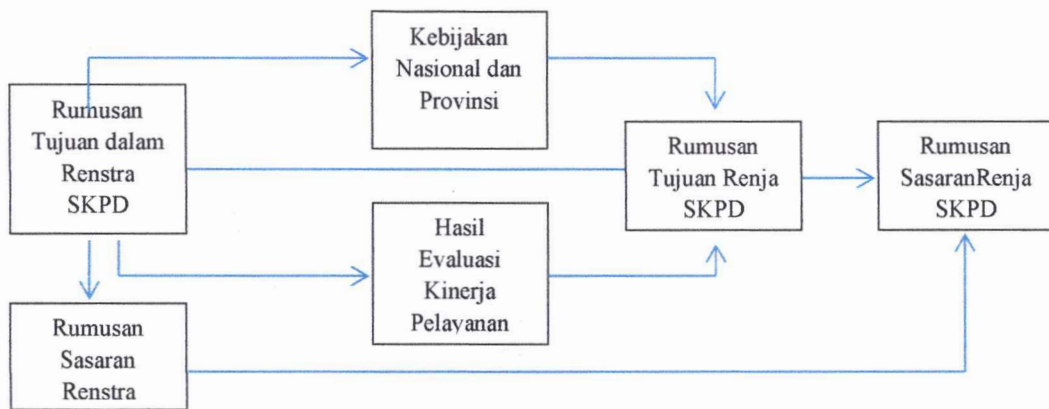
#### **1.1. LATAR BELAKANG**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD). Rencana Kerja Kecamatan Sedong Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja memuat program, kegiatan dan Sub Kegiatan, lokasi kegiatan, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pagu indikatif dan prakiraan maju dana yang dibutuhkan untuk tahun 2024

Rencana Kerja Kecamatan Sedong Tahun 2024 memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah karena Rencana Kerja pada dasarnya adalah pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Rencana Kerja Kecamatan Sedong menerjemahkan RPJMD dan RKPD Kabupaten Cirebon ke dalam rencana program, kegiatan dan

Sub Kegiatan, berikut dengan penganggarannya. Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sedong mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Sedong Tahun 2019-2024 (Renstra SKPD), hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, permasalahan yang dihadapi, dan usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat.

### PERUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA



Rencana Kerja Kecamatan Sedong memuat berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari Tujuan dan Sasaran dari Renstra Kecamatan Sedong, sebagai satuan kerja perangkat daerah yang merupakan perpanjangan tangan Bupati di wilayah kerja Kecamatan.

#### 1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sedong adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- c. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Peraturan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Tahun 2015 Nomor 157);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;

- i. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- j. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tentang hasil verifikasi dan Validasi pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
- l. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 47 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagaimana telah di ubah dengan yang Peraturan Bupati Cirebon Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 47 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024;
- m. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
- n. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 33 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 33);
- o. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 31 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 31).

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

- a. Maksud penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sedong Tahun 2024 adalah sebagai dokumen perencanaan Kecamatan Sedong untuk periode 1 (satu) tahun dan menjadi pedoman atau acuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Selain itu juga, Rencana Kerja Tahun 2024 ini dapat dijadikan bahan kajian evaluasi diri lembaga dalam meningkatkan kinerja Aparatur Pemerintah Kecamatan Sedong.
- b. Tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sedong Tahun 2024 adalah:
  1. Sebagai acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024.
  2. Untuk mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan agar mencapai target dan agar sinkron dengan visi dan misi Kabupaten Cirebon.

### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

#### **Bab I Pendahuluan**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

#### **Bab II Hasil Evaluasi Renja Kecamatan Sedong Tahun 2022**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Sedong Tahun 2022 dan Capaian Renstra Kecamatan Sedong
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Sedong
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Kecamatan Sedong
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

#### **Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah**

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan Dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Sedong

3.3. Program Dan Kegiatan

**Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah**

**Bab V Penutup**

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN SEDONG TAHUN 2022**

#### **2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN SEDONG TAHUN 2022 DAN CAPAIAN RENSTRA KECAMATAN SEDONG**

##### **A. Evaluasi dan Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2022**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan kabupaten di wilayah kerja Kecamatan. Pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Sedong Tahun 2022 dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun 2022, realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Sedong, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel 1 terlampir.

Pada tahun 2022 dianggarkan melalui APBD sebesar Rp2.577.723.964,00 (dua milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah) dan Terealisasi sebesar Rp2.485.324.235,00 (dua milyar empat ratus delapan puluh lima juta tiga ratus dua puluh empat ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) Sisa Sebesar Rp92.399.729,00 (sembilan puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) atau tercapai 96,42 %. Target dan Capaian Kinerja telah tercapai sesuai dengan program dan kegiatan yang telah dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Sedong Tahun Anggaran 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

**(1) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.**

Alokasi anggaran untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten / Kota sebesar Rp2.330.988.664,00 (dua milyar tiga ratus tiga puluh juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus enam puluh empat rupiah) dan terealisasi sebesar Rp2.241.378.935,00 (dua milyar dua ratus empat puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) sisa sebesar Rp89.609.729,00 (delapan puluh sembilan juta enam ratus sembilan ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) atau tercapai sebesar 96,16%.

**Outcome** Program adalah :

Meningkatnya Persentase Kepatuhan dalam Pelaksanaan SOP Pelayanan Pemerintah 100%.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

**A. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Alokasi anggaran untuk kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah sebesar Rp15.419.500,00 (lima belas juta empat ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp15.419.500,00 (lima belas juta empat ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah) sisa sebesar Rp0,00 (nol rupiah) atau tercapai sebesar 100%.

**Output** kegiatan adalah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang di hasilkan.

**Outcome** Sub Kegiatan adalah Meningkatkan Persentase Kepatuhan dalam Pelaksanaan SOP Pelayanan Pemerintah.

a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar

Rp9.591.000,00 (sembilan juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp9.591.000,00 (sembilan juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) sisa sebesar Rp0,00 (nol rupiah) atau tercapai sebesar 100%.

**Output** sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen perencanaan yang dihasilkan sebanyak 2 (dua) dokumen.

**Outcome** Sub Kegiatan adalah Meningkatnya Persentase Kepatuhan dalam Pelaksanaan SOP Pelayanan Pemerintah.

- b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp5.828.500,00 (lima juta delapan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp5.828.500,00 (lima juta delapan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) sisa sebesar Rp0,00 (nol rupiah) atau tercapai sebesar 100%.

**Output** sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang dihasilkan sebanyak 5 (lima) laporan.

**Outcome** Sub Kegiatan adalah Meningkatnya Persentase Kepatuhan dalam Pelaksanaan SOP Pelayanan Pemerintah.

#### **B. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

Alokasi anggaran untuk Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, sebesar Rp1.867.928.600,00 (satu milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu enam ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp1.797.311.625,00 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus sebelas ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) sisa sebesar Rp70.616.975,00 (tujuh puluh juta enam ratus enam belas ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) atau tercapai sebesar 96,22%.

**Output** kegiatan adalah Jumlah laporan pengadministrasian keuangan.

**Outcome** Sub Kegiatan adalah Meningkatnya Persentase Kepatuhan dalam Pelaksanaan SOP Pelayanan Pemerintah.

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.856.103.600,00 (satu milyar delapan ratus lima puluh enam juta seratus tiga ribu enam ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp1.786.237.125,00 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu seratus dua puluh lima rupiah) sisa sebesar Rp69.866.475,00 (enam puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) atau tercapai sebesar 96,24%.

**Output** sub kegiatan adalah Jumlah Pegawai ASN yang terbayar Gaji dan Tunjangannya setiap bulan sebanyak 13 (tiga belas) pegawai.

**Outcome** Sub Kegiatan adalah Meningkatnya Persentase Kepatuhan dalam Pelaksanaan SOP Pelayanan Pemerintah.

- b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp5.336.000,00 (lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp5.335.500,00 (lima juta tiga ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah) sisa sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah) atau tercapai sebesar 99.99%.

**Output** sub kegiatan adalah Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang dihasilkan sebanyak 1 (satu) laporan.

**Outcome** Sub Kegiatan adalah Meningkatnya Persentase Kepatuhan dalam Pelaksanaan SOP Pelayanan Pemerintah.

- c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp6.489.000,00 (enam juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp5.739.000,00 (lima juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) sisa sebesar

Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau tercapai sebesar 88,44%.

**Output** sub kegiatan adalah Jumlah dokumen laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran yang dihasilkan sebanyak 18 (delapan belas) Laporan.

**Outcome** Sub Kegiatan adalah Meningkatnya Persentase Kepatuhan dalam Pelaksanaan SOP Pelayanan Pemerintah.

### **C. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

Alokasi anggaran untuk Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, sebesar Rp5.850.000,00 (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp5.850.000,00 (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sisa sebesar Rp0,00 (nol rupiah) atau tercapai sebesar 100%.

**Output** kegiatan adalah Jumlah pegawai yang teradministrasi dengan baik.

**Outcome** Sub Kegiatan adalah Meningkatnya Persentase Kepatuhan dalam Pelaksanaan SOP Pelayanan Pemerintah.

a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp5.850.000,00 (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp5.850.000,00 (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sisa sebesar Rp0,00 (nol rupiah) atau tercapai sebesar 100%.

**Output** sub kegiatan adalah Jumlah Pakaian Dinas beserta perlengkapannya.

**Outcome** Sub Kegiatan adalah Meningkatnya Persentase Kepatuhan dalam Pelaksanaan SOP Pelayanan Pemerintah.

### **D. Administrasi Umum Perangkat Daerah**

Alokasi anggaran untuk Administrasi Umum Perangkat Daerah, sebesar Rp104.434.400,00 (seratus empat juta empat

ratus tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp104.363.900,00 (seratus empat juta tiga ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) sisa sebesar Rp70.500,00 (tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) atau tercapai sebesar 99,93%.

**Output** kegiatan adalah Jumlah komponen penunjang kinerja pelayanan sebanyak 8 (delapan) jenis.

**Outcome** Sub Kegiatan adalah Meningkatnya Persentase Kepatuhan dalam Pelaksanaan SOP Pelayanan Pemerintah.

b. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp8.146.800,00 (delapan juta seratus empat puluh enam ribu delapan ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp8.146.800,00 (delapan juta seratus empat puluh enam ribu delapan ratus rupiah) sisa sebesar Rp0,00 (nol rupiah) atau tercapai sebesar 100%.

**Output** sub kegiatan adalah Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan sebanyak 6 (enam) jenis.

**Outcome** Sub Kegiatan adalah Meningkatnya Persentase Kepatuhan dalam Pelaksanaan SOP Pelayanan Pemerintah.

c. Sub sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp50.969.700,00 (lima puluh juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp50.969.700,00 (lima puluh juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) sisa sebesar Rp0,00 (nol rupiah) atau tercapai sebesar 100%.

**Output** sub kegiatan adalah Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang di sediakan sebanyak 8 (delapan) unit.

**Outcome** Sub Kegiatan adalah Meningkatnya Persentase Kepatuhan dalam Pelaksanaan SOP Pelayanan Pemerintah.

d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan terealisasi sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) sisa sebesar Rp0,00 (nol rupiah) atau tercapai sebesar 100%.

**Output** sub kegiatan adalah Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan sebanyak 500 (lima ratus) Dus.

**Outcome** Sub Kegiatan adalah Meningkatnya Persentase Kepatuhan dalam Pelaksanaan SOP Pelayanan Pemerintah.

e. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp8.198.900,00 (delapan juta seratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp8.198.700,00 (delapan juta seratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) sisa sebesar Rp200,00 (dua ratus rupiah) atau tercapai sebesar 99,99%.

**Output** sub kegiatan adalah Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan sebanyak 8 (delapan) jenis.

**Outcome** Sub Kegiatan adalah Meningkatnya Persentase Kepatuhan dalam Pelaksanaan SOP Pelayanan Pemerintah.

f. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) sisa sebesar Rp0,00 (nol rupiah) atau tercapai sebesar 100%.

**Output** sub kegiatan adalah Jumlah bahan bacaan yang disediakan sebanyak 2 (dua) jenis.

**Outcome** Sub Kegiatan adalah Meningkatnya Persentase Kepatuhan dalam Pelaksanaan SOP Pelayanan Pemerintah.

g. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material, dengan alokasi anggaran sebesar Rp19.719.000,00 (sembilan belas juta tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah) dan terealisasi

sebesar Rp19.648.700,00 (Sembilan belas juta enam ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) sisa sebesar Rp70.300,00 (tujuh puluh ribu tiga ratus rupiah) atau tercapai sebesar 99,64%.

**Output** sub kegiatan adalah Jumlah Bahan/Material yang disediakan sebanyak 22 (dua puluh dua) jenis.

**Outcome** Sub Kegiatan adalah Meningkatnya Persentase Kepatuhan dalam Pelaksanaan SOP Pelayanan Pemerintah.

h. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sisa sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah) atau tercapai sebesar 100%.

**Output** sub kegiatan adalah Jumlah Laporan hasil perjalanan dinas ( dalam daerah ) sebanyak 38 (tiga puluh delapan) laporan.

**Outcome** Sub Kegiatan adalah Meningkatnya Persentase Kepatuhan dalam Pelaksanaan SOP Pelayanan Pemerintah.

#### **E. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.**

Alokasi anggaran untuk Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp38.486.000,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp36.500.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) sisa sebesar Rp1.986.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) atau tercapai sebesar 94,84%.

**Output** kegiatan adalah Jumlah barang milik daerah yang diadakan

**Outcome** Sub Kegiatan adalah Meningkatnya Persentase Kepatuhan dalam Pelaksanaan SOP Pelayanan Pemerintah.

- a. Sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp38.486.000,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp36.500.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) sisa sebesar Rp1.986.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) atau tercapai sebesar 94,84%.

**Output** sub kegiatan adalah Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan

**Outcome** Sub Kegiatan adalah Meningkatnya Persentase Kepatuhan dalam Pelaksanaan SOP Pelayanan Pemerintah.

#### **F. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Alokasi anggaran untuk Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp34.099.264,00 (tiga puluh empat juta sembilan puluh Sembilan ribu dua ratus enam puluh empat rupiah) dan terealisasi sebesar Rp31.038.710,00 (tiga puluh satu juta tiga puluh delapan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) sisa sebesar Rp3.060.554,00 (tiga juta enam puluh ribu lima ratus lima puluh empat rupiah) atau tercapai sebesar 91,02%.

**Output** kegiatan adalah Jumlah Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah yang dibayarkan/dilaksanakan.

**Outcome** Sub Kegiatan adalah Meningkatnya Persentase Kepatuhan dalam Pelaksanaan SOP Pelayanan Pemerintah.

- a. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp29.999.264,00 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh empat rupiah) dan terealisasi sebesar Rp28.320.710,00

(dua puluh delapan juta tiga ratus dua puluh ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) sisa sebesar Rp1.678.554,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus lima puluh empat rupiah) atau tercapai sebesar 94,40%.

**Output** sub kegiatan adalah Jumlah rekening yang dibayarkan.

**Outcome** Sub Kegiatan adalah Meningkatnya Persentase Kepatuhan dalam Pelaksanaan SOP Pelayanan Pemerintah.

- b. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp2.718.000,00 (dua juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah) sisa sebesar Rp1.382.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah) atau tercapai sebesar 66,29%.

**Output** sub kegiatan adalah Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan.

**Outcome** Sub Kegiatan adalah Meningkatnya Persentase Kepatuhan dalam Pelaksanaan SOP Pelayanan Pemerintah.

**G. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.**

Alokasi anggaran untuk Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp264.770.900,00 (dua ratus enam puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp250.895.200,00 (dua ratus lima puluh juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah) sisa sebesar Rp13.875.700,00 (tiga belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) atau tercapai sebesar 94,15%.

**Output** kegiatan adalah Jumlah barang milik daerah yang dipelihara.

**Outcome** Sub Kegiatan adalah Meningkatnya Persentase Kepatuhan dalam Pelaksanaan SOP Pelayanan Pemerintah.

a. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp37.786.500,00 (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp37.210.000,00 (tiga puluh tujuh juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) sisa sebesar Rp576.500,00 (lima ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah) atau tercapai sebesar 98,47%.

**Output** sub kegiatan adalah Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara.

**Outcome** Sub Kegiatan adalah Meningkatnya Persentase Kepatuhan dalam Pelaksanaan SOP Pelayanan Pemerintah.

b. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.850.500,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.2.661.700,00 sisa sebesar Rp188.800,00 (seratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) atau tercapai sebesar 93,38%.

**Output** sub kegiatan adalah Jumlah kendaraan Dinas Operasional yang dibayarkan pajak dan jasa pemeliharaannya.

**Outcome** Sub Kegiatan adalah Meningkatnya Persentase Kepatuhan dalam Pelaksanaan SOP Pelayanan Pemerintah.

c. Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp224.133.900,00 (dua ratus dua puluh empat juta seratus tiga puluh tiga ribu Sembilan ratus rupiah) dan

terrealisasi sebesar Rp211.023.500,00 (dua ratus sebelas juta dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah) sisa sebesar Rp13.110.400,00 (tiga belas juta seratus sepuluh ribu empat ratus rupiah) atau tercapai sebesar 94,15%.

**Output** sub kegiatan adalah Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara.

**Outcome** Sub Kegiatan adalah Meningkatnya Persentase Kepatuhan dalam Pelaksanaan SOP Pelayanan Pemerintah.

(2) **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK.**

Alokasi anggaran untuk program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, sebesar Rp99.619.600,00 (sembilan puluh sembilan juta enam ratus sembilan belas ribu enam ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp98.559.600,00 (sembilan puluh delapan juta lima ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) sisa sebesar Rp1.060.000,00 (satu juta enam puluh ribu rupiah) atau tercapai sebesar 98,94%.

**Outcome** Program adalah:

Persentase Peningkatan Pelimpahan Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 100%.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

A. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp45.994.400,00 (empat puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp45.994.400,00 (empat puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah) sisa sebesar Rp0,00 (nol rupiah) atau tercapai sebesar 100%.

**Output** kegiatan adalah Jumlah koordinasi penyelenggaraan pemerintah di tingkat kecamatan.

**Outcome** Sub Kegiatan adalah Meningkatnya Persentase Kepatuhan dalam Pelaksanaan SOP Pelayanan Pemerintah.

a. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait, dengan alokasi anggaran sebesar Rp22.499.900,00 (dua puluh dua juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp22.499.900,00 (dua puluh dua juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) sisa sebesar Rp0,00 (nol rupiah) atau tercapai sebesar 100%.

**Output** sub kegiatan adalah Jumlah Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.

**Outcome** Sub Kegiatan adalah Meningkatnya Persentase Kepatuhan dalam Pelaksanaan SOP Pelayanan Pemerintah.

b. Sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp23.494.500,00 (dua puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp23.494.500,00 (dua puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah) sisa sebesar Rp0,00 (nol rupiah) atau tercapai sebesar 100%.

**Output** sub kegiatan adalah Jumlah Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.

**Outcome** Sub Kegiatan adalah Meningkatnya Persentase Kepatuhan dalam Pelaksanaan SOP Pelayanan Pemerintah.

B. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp18.122.000,00 (delapan belas juta seratus dua puluh dua ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp18.122.000,00 (delapan belas juta seratus dua puluh dua ribu rupiah) sisa sebesar Rp0,00 (nol rupiah) atau tercapai sebesar 100%.

**Output** kegiatan adalah Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan kecamatan yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah.

**Outcome** Sub Kegiatan adalah Meningkatnya Persentase Kepatuhan dalam Pelaksanaan SOP Pelayanan Pemerintah.

a. Sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp18.122.000,00 (delapan belas juta seratus dua puluh dua ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp18.122.000,00 (delapan belas juta seratus dua puluh dua ribu rupiah) sisa sebesar Rp0,00 (nol rupiah) atau tercapai sebesar 100%.

**Output** sub kegiatan adalah Jumlah Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan dari Bupati kepada Camat.

**Outcome** Sub Kegiatan adalah Meningkatnya Persentase Kepatuhan dalam Pelaksanaan SOP Pelayanan Pemerintah.

C. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp35.503.200,00 (tiga puluh lima juta lima ratus tiga ribu dua ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp34.443.200,00 (tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah) sisa sebesar Rp1.060.000,00 (satu juta enam puluh ribu rupiah) atau tercapai sebesar 97,01%.

**Output** kegiatan adalah Jumlah jenis urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat.

**Outcome** Sub Kegiatan adalah Meningkatnya Persentase Kepatuhan dalam Pelaksanaan SOP Pelayanan Pemerintah.

a. Sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp35.503.200,00 (tiga puluh lima juta lima ratus tiga ribu dua ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp34.443.200,00 (tiga puluh empat juta

empat ratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah) sisa sebesar Rp1.060.000,00 (satu juta enam puluh ribu rupiah) atau tercapai sebesar 97,01%.

**Output** sub kegiatan adalah Jumlah Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan dari Bupati kepada Camat.

**Outcome** Sub Kegiatan adalah Meningkatnya Persentase Kepatuhan dalam Pelaksanaan SOP Pelayanan Pemerintah.

### **(3) PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**

Alokasi anggaran untuk Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, sebesar Rp39.119.900,00 (tiga puluh sembilan juta seratus sembilan belas ribu sembilan ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp37.389.900,00 (tiga puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) sisa sebesar Rp1.730.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) atau tercapai sebesar 95,58 %.

**Outcome** Program adalah :

Persentase jumlah Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan 100%.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

A. Kegiatan Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp39.119.900,00 (tiga puluh sembilan juta seratus sembilan belas ribu sembilan ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp37.389.900,00 (tiga puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) sisa sebesar Rp1.730.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) atau tercapai sebesar 95,58 %.

**Output** kegiatan adalah Jumlah jenis urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat.

**Outcome** Sub Kegiatan adalah Meningkatnya Persentase Kepatuhan dalam Pelaksanaan SOP Pelayanan Pemerintah.

- a. Sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp39.119.900,00 (tiga puluh sembilan juta seratus sembilan belas ribu sembilan ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp37.389.900,00 (tiga puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) sisa sebesar Rp1.730.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) atau tercapai sebesar 95,58%.

**Output** sub kegiatan adalah Jumlah Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan dari Bupati kepada Camat.

**Outcome** Sub Kegiatan adalah Meningkatnya Persentase Kepatuhan dalam Pelaksanaan SOP Pelayanan Pemerintah.

#### **(4) PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

Alokasi anggaran untuk Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum, sebesar Rp22.445.800,00 (dua puluh dua juta empat ratus empat puluh lima ribu delapan ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp22.445.800,00 (dua puluh dua juta empat ratus empat puluh lima ribu delapan ratus rupiah) sisa sebesar Rp0,00 (nol rupiah) atau tercapai sebesar 100%.

**Outcome** Program adalah :

Persentase peningkatan kegiatan koordinasi untuk meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum 100%.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

- A. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp22.445.800 (dua puluh dua juta empat ratus empat puluh lima ribu delapan ratus rupiah) dan

terrealisasi sebesar Rp22.445.800,00 (dua puluh dua juta empat ratus empat puluh lima ribu delapan ratus rupiah) sisa sebesar Rp0,00 (nol rupiah) atau tercapai sebesar 100 %.

**Output** kegiatan adalah Jumlah jenis urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat.

**Outcome** Sub Kegiatan adalah Meningkatnya Persentase Kepatuhan dalam Pelaksanaan SOP Pelayanan Pemerintah.

a. Sub kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya dibidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan alokasi anggaran sebesar Rp22.445.800,00 (dua puluh dua juta empat ratus empat puluh lima ribu delapan ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp22.445.800,00 (dua puluh dua juta empat ratus empat puluh lima ribu delapan ratus rupiah) sisa sebesar Rp0,00 (nol rupiah) atau tercapai sebesar 100%.

**Output** sub kegiatan adalah Jumlah Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan dari Bupati kepada Camat.

**Outcome** Sub Kegiatan adalah Meningkatnya Persentase Kepatuhan dalam Pelaksanaan SOP Pelayanan Pemerintah.

#### **(5) PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**

Alokasi anggaran untuk Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum, sebesar Rp85.550.000,00 (delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 85.550.000,00 (delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sisa sebesar Rp0,00 (nol rupiah) atau tercapai sebesar 100%.

**Outcome** Program adalah:

1. Persentase jumlah urusan pemerintahan umum yang di tugaskan kepala pemerintah daerah kepada camat 100%.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

A. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp85.550.000,00 (delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp85.550.000,00 (delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sisa sebesar Rp0,00 (nol rupiah) atau tercapai sebesar 100%.

**Output** kegiatan adalah Jumlah jenis urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat.

**Outcome** Sub Kegiatan adalah Meningkatnya Persentase Kepatuhan dalam Pelaksanaan SOP Pelayanan Pemerintah.

a. Sub kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, dengan alokasi anggaran sebesar Rp85.550.000,00 (delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp85.550.000,00 (delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sisa sebesar Rp0,00 (nol rupiah) atau tercapai sebesar 100%.

**Output** sub kegiatan adalah Jumlah Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan dari Bupati kepada Camat.

**Outcome** Sub Kegiatan adalah Meningkatnya Persentase Kepatuhan dalam Pelaksanaan SOP Pelayanan Pemerintah.

Tabel 2.1

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Sedong dan Pencapaian Renstra Kecamatan Sedong s.d Tahun 2023 Kabupaten Cirebon**

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Sedong

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kecamatan Sedong) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Rencana Kecamatan Sedong Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Kecamatan Sedong s.d Tahun 2023	
					Target Rencana Kecamatan Sedong Tahun 2022	Realisasi Rencana Kecamatan Sedong Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%) Tahun 2022		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Meningkatnya Persentase kapatuhan dalam pelaksanaan S pelayanan Pemerintah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	100
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan yang dihasilkan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dok	2 Dok	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100	5 Dok	5 Dok	100

		Realisasi Kinerja SKPD yang dihasilkan	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	100	3 Jenis	3 Jenis	100	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah laporan pengadministrasian Keuangan	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	100	3 Jenis	3 Jenis	100	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai ASN yang terbayar Gaji dan tunjangannya setiap bulan.	13 Pegawai	13 Pegawai	13 Pegawai	100	13 Pegawai	13 Pegawai	100	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang dihasilkan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dok	100	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan yang dihasilkan	18 Dokumen	18 Dokumen	18 Dokumen	100	18 Dokumen	18 Dokumen	100	
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Jumlah pegawai yang teradministrasi dengan baik	21 orang	21 orang	21 orang	100	21 orang	21 orang	100	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakian Dinas beserta Perlengkapannya	22 Stell	-	-	-	22 Stell	22 Stell	100	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah Komponen penunjang kinerja pelayanan	8 jenis	8 jenis	8 jenis	100	8 jenis	8 jenis	100	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah instalasi listrik/penerangan Bangunan kantor yang disediakan	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	100	6 Jenis	6 Jenis	100	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang di sediakan	12 Jenis	8 Jenis	1Jenis	100	12 Jenis	12 Jenis	100	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	500 Dus	500 Dus	500 Dus	100	500 Dus	500 Dus	100	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	8 Jenis	8 Jenis	8 Jenis	99,70	8 Jenis	8 Jenis	100	

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	11 bulan	91,75	12 Bulan	12 Bulan	100
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bahan/Material yang disediakan	30 Jenis	30 Jenis	22 Jenis	22 Jenis	100	35 Jenis	35 Jenis	100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan hasil perjalanan dinas ( dalam daerah )	96 Kali	96 Kali	96 Kali	96 Kali	100	96 Kali	96 Kali	100
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan</b>	2 jenis	2 jenis	-	-	-	4 Jenis	4 Jenis	100
Pengadaan kendaraan perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan	2 jenis	2 jenis	-	-	-	4 Jenis	4 Jenis	100
<b>Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dibayarkan/dilaksanakan	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	100	4 Jenis	4 Jenis	100
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayarkan	3 Rekening	3 Rekening	12 Bulan	12 Bulan	84,18	3 Rekening	3 Rekening	100
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5 Unit	5 Unit	5 Unit	1 Unit	100	10 unit	10 unit	100
<b>Pemeliharaan, Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	100	5 dokumen	5 dokumen	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	95,71	10 Unit	10 Unit	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional yang dibayarkan pajak dan jasa pemeliharannya	12 Unit	12 Unit	12 Unit	12 Unit	79,81	12 Unit	12 Unit	100

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara	1 unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100	1 Unit	100
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Persentase Peningkatan Pelimpahan Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	-	-	-	-	100	-	100
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Peringkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Peringkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-	-	-	-	-	100	3 Kegiatan	100
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	91,20	13 Kegiatan	100
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	99,63	13 Kegiatan	100
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan dari Bupati kepada Camat.	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	89,26	13 Kegiatan	100
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase jumlah Pemberdayaan Masyarakat Desa dan	-	-	-	-	-	-	-	100



Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pelaksanaan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Rapat / Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pelaksanaan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	-	-	-	-	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	8 Kegiatan	8 Kegiatan	100
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Fasilitasi dan Pembinaan tentang Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	-	-	-	-	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100
Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa yang dilaksanakan	-	-	-	-	-	-	-	4 Laporan	4 Laporan	100
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Pembinaan Kerukunan Antar suku, Umat beragama, Ras dan golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas keamanan Lokal , Regional dan Nasional.	-	-	-	-	-	-	-	8 Kegiatan	8 Kegiatan	100
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Rapat / Kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Tingkat Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	8 Kegiatan	8 Kegiatan	100
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Peningkatan Persentase kegiatan pembinaan dan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100



## 2.2. ANALISA KINERJA PELAYANAN KECAMATAN SEDONG

Secara umum, sebagian besar pelayanan di Kantor Kecamatan Sedong dapat berjalan sesuai dengan target. Keuangan sebagai salah satu sumber daya instansi merupakan aspek penting dalam menunjang pelayanan yang dilaksanakan oleh SKPD. Kinerja pelayanan suatu SKPD turut dipengaruhi oleh kapasitas keuangan di dalam SKPD tersebut. Jumlah anggaran Kantor Kecamatan Sedong dalam 5 (lima) tahun terakhir mengalami pasang surut disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi keuangan daerah Kabupaten Cirebon. Pengelolaan pendanaan pelayanan Kecamatan Sedong dalam pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2019 -2024

Kondisi masyarakat yang selalu dinamis menuntut adanya pelayanan publik yang prima dan berkembang sesuai tuntutan perubahan waktu. Kondisi lingkungan eksternal ini akan berimplikasi sebagai peluang dan tantangan bagi pengembangan pelayanan SKPD pada 5 (lima) tahun mendatang. Analisis lingkungan eksternal tersebut dilakukan salah satunya melalui telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cirebon. Untuk analisis Renstra K/L, SKPD Provinsi dan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Cirebon tidak dapat dilakukan karena tidak tersedianya data. Telaahan RTRW ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Kantor Kecamatan Sedong berupa arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan dalam 5 (lima) tahun mendatang

Berkaitan dengan tugas pokok dan kewenangan yang ada di kecamatan maka pada kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan terdapat banyak peluang dan tantangan pelayanan yang harus dilaksanakan oleh pihak Kecamatan Sedong. Peluang dan tantangan terbesar ke depan adalah terkait rencana pengembangan kawasan industri menengah di Kecamatan Sedong. Sebagai pusat Kegiatan Lokal , yang memerlukan pembangunan sarana dan prasarana serta dampaknya terkait dengan pelayanan yang terdapat di Kecamatan Sedong.

Peluang dan tantangan pelayanan tersebut harus dilaksanakan dalam rangka perwujudan pola ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kecamatan Sedong, yaitu antara lain :

1. Fasilitasi dan Koordinasi Penanggulangan Masalah Sosial.
2. Monitoring dan Inventarisasi Data Jalan Umum dan Jalan Lingkungan serta Data Drainase.
3. Pengawasan Kebersihan Lingkungan.
4. Inventarisir Potensi Wisata

5. Pelayanan Fasilitasi dan Koordinasi Monitoring dan Inventarisasi Data Tata Bangunan,
6. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Wilayah, Serta
7. Fasilitasi Pendataan dan Pembinaan Usaha Formal.

Peluang dan tantangan pengembangan pelayanan tersebut diarahkan di seluruh Desa di Kecamatan Sedong.

Pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Sedong yang disesuaikan menurut perangkat daerah masing-masing sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sedong**  
**Kabupaten Cirebon**

Indikator	Target Renstra Kecamatan Sedong						Realisasi Capaian			Proyeksi			Catatan Analisis
	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
	Meningkatnya Persentase Kepatuhan dalam Pelaksanaan SOP Pelayanan Pemerintah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	99,69 %	98,37 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang di hasilkan	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	7 Dokumen	4 Dokmen	3 Dokumen	4 Dokmen		
Jumlah Dokumen perencanaan yang dihasilkan	2 Dokume	2 Dokumen	2 Dokume	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokume	2 Dokumen	2 Dokumen		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokume	2 Dokumen	2 Dokume	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokume	2 Dokumen	2 Dokumen		
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang di hasilkan .(IKU PERKIN, LPPD - LKPJ, LAKIP)	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen		
Jumlah Responden yang diambil Sampel Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	200 Responden	200 Responden	200 Responden	200 Responden	200 Responden	0 Responden	0 Responden	150 Responden	150 Responden	0 Responden	150 Responden		
Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang dihasilkan	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen		
Jumlah Pegawai ASN yang terbayar Gaji dan Tunjangannya setiap Bulan.	0 Pegawai	16 Pegawai	17 Pegawai	18 Pegawai	18 Pegawai	15 Pegawai	13 Pegawai	15 Pegawai	15 Pegawai	14 Pegawai	14 Pegawai		
Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang dihasilkan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		
Jumlah dokumen laporan keuangan yang dihasilkan	0 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	0 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen		
Jumlah laporan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		

pengadministrasian kepegawaian tingkat kecamatan	Laporan	Laporan	25 Stell	25 Stell	25 Stell	25 Stell	25 Stell	25 Stell	22 Stell	22 Stell	0 Stell	25 Stell
Jumlah Pakian Dinas beserta Perlengkapannya yang diadakan	0 Stell	25 Stell	25 Stell	25 Stell	25 Stell	25 Stell	25 Stell	25 Stell	22 Stell	22 Stell	0 Stell	25 Stell
Jumlah instalasi listrik/penerangan Bangunan kantor yang disediakan.	0 Jenis	8 Jenis	10 Jenis	12 Jenis	12 Jenis	12 Jenis	12 Jenis	12 Jenis	8 Jenis	6 Jenis	0 Jenis	4 Jenis
Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan.	7 Jenis	8 Jenis	10 Jenis	10 Jenis	13 Jenis	13 Jenis	13 Jenis	13 Jenis	8 Jenis	4 Jenis	12 Jenis	6 Jenis
Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan.	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Blan
Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan.	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	8 Jenis	8 Jenis	8 Jenis	8 Jenis	4 Jenis	3 Jenis	4 Jenis	4 Jenis
Jumlah bahan bacaan yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	1 Media	1 Media	1 Media	1 Media	1 Media	12 Bulan	1 Media	1 Media
Jumlah Bahan/Material yang disediakan.	36 Jenis	38 Jenis	38 Jenis	38 Jenis	42 Jenis	42 Jenis	36 Jenis	38 Jenis	18 Jenis	18 Jenis	38 Jenis	20 Jenis
Jumlah Laporan hasil perjalanan dinas ( dalam daerah )	34 Laporan	34 Laporan	34 Laporan	34 Laporan	35 Laporan	35 Laporan	30 Laporan	33 Laporan	33 Laporan	20 Laporan	0 Laporan	10 Laporan
Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pemerintahan Daerah	2 Laporan	2 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan
Jumlah rekening yang dibayarkan	2 Rekening	3 Rekening	3 Rekening	3 Rekening	3 Rekening	3 Rekening	3 Rekening	3 Rekening	1 Rekening	3 Rekening	1 Rekening	1 Rekening
Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan.	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	4 Jenis	3 Jenis
Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Laporan	4 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan
Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara.	13 Unit	13 Unit	13 Unit	13 Unit	15	15	10 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit
Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang diurus Perijinannya.	11 Unit	13 Unit	15 Unit	15 Unit	15	15	10 Unit	9 Unit	9 Unit	9 Unit	9 Unit	9 Unit
Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara.	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1	1	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit
Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara	0	3	3	3	3	3	0	0	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit
Persentase PeningkatanEfektifitas Penyelenggaraan Pemerintah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	98 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100





### **2.3. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH**

Isu - Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang diperhatikan dalam perencanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun dalam melaksanakan atau menyelenggarakan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Sedong kepada masyarakat. Analisa isu - isu strategis diidentifikasi berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Sedong dalam menjalankan pemerintahan ada berbagai permasalahan, sebagai berikut:

#### **a. Bidang Sekretariat**

1. Sarana dan prasarana di Kecamatan Sedong masih kurang memadai sehingga memperlambat kinerja kegiatan administrasi perkantoran misalnya
  - banyaknya alat-alat yang menunjang kegiatan tersebut rusak berat yang tidak bisa diperbaiki, misalnya komputer, printer, laptop yang spesifikasinya sudah tidak memadai;
  - Perlu adanya pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya untuk menunjang pelayanan administrasi perkantoran dan menciptakan Gedung kantor yang representative.
2. Kurangnya pegawai yang berstatus PNS Kantor Kecamatan Sedong, untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya Penambahan Pegawai.
3. Kecamatan merupakan salah satu unit Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan adanya Peraturan Bupati Cirebon nomor 67 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Bupati Cirebon nomor 18 tahun 2010 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Pemerintah dari Bupati kepada Camat maka kecamatan akan kekurangan SDM Aparatur maupun Sarana prasarana yang memadai sehingga pelayanan kurang maksimal (kepuasan masyarakat rendah).

**b. Bidang Ekonomi dan Pembangunan**

1. Kecamatan Sedong mempunyai beberapa desa yang mempunyai permasalahan dengan tanah bergerak diantaranya desa Sedong Kidul dan desa Karangwuni dimana setiap tahunnya Ketika musim penghujan maka jalan penghubung antar 2 (dua) dusun yang terpencil tertutup, adanya beberapa desa yang rawan banjir;
2. Kecamatan Sedong mempunyai potensi pariwisata yang perlu dikembangkan diantaranya
  - Setu Sedong yang perlu di kembangkan sehingga tidak hanya berfungsi sebagai pengairan persawahan yang ada di sekitarnya bisa juga meningkatkan perekonomian sekitarnya;
  - Sepanjang sungai Cimanis – Cisanggarung yang melewati beberapa desa merupakan potensi pariwisata yang bisa dikembangkan ini sudah digagas oleh desa Panambangan yang telah melaksanakan uji kelayakan arung jeram dengan hasil yang layak untuk dikembangkan;
  - Taman Teknologi Pertanian (TTP) yang merupakan salah satu potensi pengembangan ketahanan pangan di Kecamatan Sedong.
3. Pengelolaan sampah yang belum maksimal maksudnya setiap desa telah menganggarkan untuk pembangunan (TPS) Tempat Pembuangan Sampah tapi pengelolaannya masih belum berjalan secara optimal;
4. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
5. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat dalam teknologi IT dan pembangunan, sehingga perlu adanya pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan;
6. Tingginya kerusakan infrastruktur wilayah desa seperti jalan lingkungan, sanitasi lingkungan masih rendah;

7. Kurangnya pemerataan pembangunan wilayah Desa dan Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah;
8. Pemutakhiran data yang kurang akurat untuk mengembangkan perencanaan pembangunan.

**c. Bidang Tata Pemerintahan**

1. Seiring dengan adanya perubahan peraturan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah membawa dampak yang cukup signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah, peran kecamatan hanya bersifat Fasilitasi dan koordinasi tidak lagi sebagai kepala wilayah;
2. Masih rendahnya kapasitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan desa;
3. Masih rendahnya kinerja dan akuntabilitas aparatur Desa;
4. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat dan aparatur Desa dalam teknologi IT dan pembangunan, sehingga perlu adanya pemberdayaan masyarakat dan Aparatur Desa untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan.

**d. Bidang Pelayanan Umum**

1. Masih kurangnya pelayanan publik terhadap masyarakat sehingga masyarakat belum puas;
2. Sarana dan prasarana terutama peralatan komputer yang sudah lama dan perlu diganti serta jaringan untuk penanganan sistem kependudukan masih sering terjadi gangguan.
3. Sarana dan prasarana penunggu pemohon yang kurang memadai.

**e. Bidang Kesejahteraan Sosial**

1. Dalam Pendidikan dimana jarak ke Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Negeri (SLTA)  $\pm$  7 KM dan Kecamatan Sedong bukan merupakan Kecamatan penyangga sehingga banyak siswa yang merupakan warga Sedong yang tidak diterima

dalam Penerimaan Siswa Baru karena factor zonasi maka diperlukan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) Negeri di Kecamatan Sedong.

2. Kurangnya koordinasi dengan dinas sosial tentang pemberian bantuan untuk masyarakat;
3. Pemutakiran data penerima bantuan yang kurang akurat.

**f. Bidang Ketenteraman dan Ketertiban**

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum;
2. Kurangnya sarana dan prasarana Kamtibmas di Kantor Kecamatan Sedong;
3. Pengetahuan SDM anggota Linmas masih rendah sehingga perlu adanya pembinaan dalam melaksanakan tugas dalam rangka meningkatkan keamanan dan ketertiban umum;
4. Masih tingginya gangguan atau pelanggaran masyarakat.

**2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD**

Rancangan awal RKPD Kecamatan Sedong Tahun 2023 disusun berdasarkan Renstra Tahun 2019 - 2024 dengan hasil identifikasi kebutuhan program, kegiatan dan Sub Kegiatan dalam mendukung pencapaian RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019 -2024.

Tabel 2.4

**Review terhadap Rancangan Awal SKPD Tahun 2024  
Kabupaten Cirebon**

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan			
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kec. Sedong	Meningkatnya Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kec. Sedong	Meningkatnya Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran		
	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Sedong				Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Sedong			
	Penyusunan Dokumen	Kec. Sedong	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,-	Penyusunan Dokumen	Kec. Sedong	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	1.759.400,-



	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Sedong	Dokumen laporan keuangan yang dihasilkan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Dokumen		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Sedong	Dokumen Perencanaan Sektoral	Laporan	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Sedong				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Sedong			
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Sedong	Jumlah Pakaian Dinas berserta Perlengkapannya	1 Paket	10.000.000,-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Sedong	Jumlah Pakaian Dinas berserta Perlengkapannya	1 Paket	6.434.609,-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Sedong				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Sedong			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Sedong	Jumlah komponen instalasi Listrik yang disediakan	6 paket	25.000.000,-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Sedong	Jumlah komponen instalasi Listrik yang disediakan	6 paket	941.400,-

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Sedong	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 paket	100.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Sedong	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 paket	22.045.710,-
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Sedong	Jumlah Makan Minum Tamu	12 paket	12.000.000,-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Sedong	Jumlah Makan dan Minum Tamu	12 paket	2.000.000,-
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Sedong	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12 paket	14.000.000,-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Sedong	Jumlahl Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12 paket	2.400.000,-
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	Kec. Sedong	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	2 Dokumen	10.000.000,-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	Kec. Sedong	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	2 Dokumen	3.900.000,-
	Penyediaan Bahan / Material	Kec. Sedong	Jumlah Bahan / Matrial	12 paket	20.000.000,-	Penyediaan Bahan / Material	Kec. Sedong	Jumlah Bahan / Matrial	12 paket	11.356.100,-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Sedong	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	48 Laporan	18.000.000,-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Sedong	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	48 Laporan	3.000.000,-
	Pengadaan Barang Milik Daerah	Kec. Sedong				Pengadaan Barang Milik Daerah	Kec. Sedong			

Penujang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Sedong	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas Oprasional atau Kendaraan Dinas jabatan	1 Unit	350.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Oprasional atau Kendaraan Dinas jabatan	Kec. Sedong	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas Oprasional atau Kendaraan Dinas jabatan	1 Unit	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Oprasional atau Kendaraan Dinas jabatan	Kec. Sedong	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas Oprasional atau Kendaraan Dinas jabatan	1 Unit	
Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Kec. Sedong	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diadakan	1 unit	500.000.000,	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Kec. Sedong	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diadakan	1 unit	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor yang diadakan	Kec. Sedong	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diadakan	1 unit	
Penyediaan Jasa Penujang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Sedong				Penyediaan Jasa Penujang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Sedong			Penyediaan Jasa Penujang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Sedong			
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Sedong	Jumlah rekening yang dibayarkan	1 laporan	60.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Sedong	Jumlah rekening yang dibayarkan	1 laporan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Sedong	Jumlah rekening yang dibayarkan	1 laporan	24,098,112.00

	bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sedong	Gedung Kantor yang dipelihara									
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Sedong	Cakupan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat									
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Sedong										
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Sedong	Jumlah Rapat Koordinasi dan / atau Pembinaan dan / atau Fasilitasi Pelimpahan Urusan Pemerintahan	12 Laporan	85.000.000,-					12 Laporan	34.776.000,-	



Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Sedong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan, Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 unit	15.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Sedong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan, Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 unit	2.640.000,-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Sedong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan, Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 unit	50.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Sedong	Jumlah Kendaraan Dinas/ Jabatan yang dipelihara	10 unit	40,018,500.00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Sedong	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang dipelihara	2 Unit	5.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Sedong	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang dipelihara	2 Unit	3,392,000.00
Pemeliharaan/Reha	Kec.	Jumlah	1 Unit	300.000.000	Pemeliharaan/Reha	Kec.	Jumlah Gedung	1 Unit	163.300.900.-



	DAN KELURAHAN					DAN KELURAHAN				Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat		Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Sedong				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Sedong						
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Sedong	105.000.000	12 Kegiatan	Jumlah Rapat Koordinasidan /atau Pembinaan dan/atau Fasilitas Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Sedong	105.000.000	12 Kegiatan	Jumlah Rapat Koordinasidan /atau Pembinaan dan/atau Fasilitas Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	12 Kegiatan	Jumlah Rapat Koordinasidan /a tau Pembinaan dan/atau Fasilitas Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	88,050.000,-
	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN	Kec. Sedong				PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN	Kec. Sedong						

	DAN KETERTIBAN UMUM		Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat					Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat	
	Koordinasi Penerapan dan Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kec. Sedong							
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Kec. Sedong	Jumlah Laporan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	50.000.000,-	12 Kegiatan	50.000.000,-	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Kegiatan	50.000.000,-



Pemerintahan Umum sesuai Penugasaan Kepala Daerah	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	80.000.000	4 Kegiatan	Jumlah Rapat / Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Rapat / Kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan di Tingkat Kecamatan,	12 Kegiatan	
Pemerintahan Umum sesuai Penugasaan Kepala Daerah	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	75.000.000	12 Kegiatan	Jumlah Rapat / Kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan di Tingkat Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		





## 2.5 PENELAHAH USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Perencanaan dan Penganggaran merupakan suatu kesatuan dan proses yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan. Mekanisme perencanaan pembangunan dimulai dari penjarangan aspirasi masyarakat dan pengkajian kebutuhan masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan di tingkat Desa yang dilanjutkan dengan musyawarah Perencanaan di tingkat Kecamatan. Proses perencanaan di Kecamatan Sedong ada 4 (empat) tahapan perencanaan pembangunan, yaitu :

1. Penyusunan Rencana
2. Penetapan Rencana
3. Pengendalian Pelaksanaan Rencana
4. Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Usulan program dan kegiatan masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tersebut dapat dilihat pada tabel Daftar Skala Prioritas Pembangunan Kecamatan Sedong Tahun 2024 sebagaimana data terlampir.

**Tabel 2.4**

### **Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Cirebon**

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Sedong

No.	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN/ Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar/ Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Kec. Sedong	Rehab Prasarana Sekolah Rehabilitasi ruang kelas SD	210.000.000/ 3 Ruang	Disdik
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN/ Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan/ Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/ Kesetaraan	Kec. Sedong	Pendidikan Paket Kesetaraan Paket C	54.000.000/ 30 orang	Disdik
3	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN/ Pengelolaan Pendidikan	Kec. Sedong	Pendidikan Paket Kesetaraan Paket B	37.500.000/ 25 Orang	Disdik

	Nonformal/Kesetaraan/ Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan				
4	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT/ Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota/ Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kec. Sedong	Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan (PMT P) bagi balita dengan status gizi sangat kurus	56,250,000/ 25 Balita	Dinkes
5	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT/ Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota/ Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kec. Sedong	Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan (PMT P) bagi Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK)	56,250,000/ 25 Bumil	Dinkes
6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE/ Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota /Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Kec. Sedong	Pembuatan Tembok Senderan pada Ruas Jalan Karangwuni - Putat	113,823,000/ 600 m <sup>2</sup>	PUTR
7	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota/ Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Kec. Sedong	Pembuatan Tembok Senderan pada Ruas Jalan Ciawijapura - Panongan Lor	100.000.000/ 600 m <sup>2</sup>	PUTR
8	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH/ Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota/ Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap	Kec. Sedong	Pembangunan Rumah Tidak layak Huni (Rutilahu)	400.000.000/ 20 unit	DPKPP

	Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha				
9	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA/ Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana/ Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kec. Sedong	Pembentukan Desa Tangguh Bencana	180.000.000/ 6 Paket	BPBD
10	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL/ Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota/ Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kec. Sedong	Peningkatan Kapasitas SDM TSKS dan Puskesmas	30.000.000/ 10 Orang	Dinsos
11	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT/ Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota / Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Kec. Sedong	Pengelolaan Sampah	58,983,000/ 1 paket	LH
12	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)/ Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota/ Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Sedong	Kecamatan Ramah Anak	1.800.000 / 2 orang	DPPKBP3A
13	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN	Kec. Sedong	Perempuan Kepala Keluarga dan Prima	20,332,000/ 30 Orang	DPPKBP3A

	GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN/ Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota/ Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				
14	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)/ Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota/ Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kec. Sedong	Penerangan Jalan Umum (PJU)	150.000.000/ 10 Titik	Dishub
15	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL/ Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota/ Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Kec. Sedong	Pemutakhiran data pembangunan Tingkat Kecamatan (PUSDATIN di Kecamatan )	18.600.000/ 1 Paket	Diskominfo
16	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN/ Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota/ Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Kec. Sedong	Kompetisi Sepakbola U-10 dan U-12	25.000.000/ 1 paket	Dispora
17	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL/ Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota/ Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Kec. Sedong	Festival tematik dan pentas seni pertunjukan tradisional Cirebonan	50.000.000/ 1 paket	Dibudpar
18	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA/	Kec. Sedong	Pembentukan Desa Wisata	200.000.000/ 1 paket	Dibudpar

	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota/ Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				
19	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/ Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar/ Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Kec. Sedong	Pelatihan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)	25.000.000/ 50 orang	Dibudpar
20	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA/ Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi/ Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Kec. Sedong	Pelatihan Audio Video Visual	57,760,000/16 orang	Disnaker
21	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN/ Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa/ Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Sedong	Pemberdayaan PKK Kecamatan untuk Pembangunan Ketahanan Keluarga	20.000.000 / 1 paket	Kec. Sedong
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA/ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Sedong	Peningkatan Fasilitas Sarana Pelayanan Publik di Kecamatan	100.000.000/1 paket	Kec. Sedong
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN/ Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa/ Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah	Kec. Sedong	Pemuktahiran Data Pembangunan Tingkat Kecamatan (Pusdatin)	11.400.000 / 1 paket	Kec. Sedong

	Kecamatan				
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN/ Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa/ Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Sedong	Pembiayaan MTQ Kecamatan	50.000.000,-	Kec. Sedong
	JUMLAH			2,026,698,000,-	

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN SEDONG**

#### **3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL**

Kebijakan-kebijakan Nasional ditetapkan dalam kerangka pembangunannya, secara operasional pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan kepada Camat dalam kegiatan penyelenggaraan pelimpahan urusan pemerintahan bidang ekonomi, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, bidang kesejahteraan sosial, bidang keamanan ketertiban perlindungan masyarakat dan pembinaan kesatuan bangsa, bidang pelayanan umum, bidang pemerintahan umum dan pemerintahan desa.

#### **3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN SEDONG**

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja SKPD selama lima tahun.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Rumusan tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi SKPD dan memiliki keterkaitan dengan visi SKPD yang ingin dicapai. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Dalam menentukan tujuan tidaklah mutlak harus terukur, kuantitatif, atau pun akuntabel, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa mendatang.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Kriteria dalam perumusan sasaran yakni:

- a. *Specific* (spesifik), yakni sifat dan tingkat sasaran dapat diidentifikasi dengan jelas;
- b. *Measurable* (dapat diukur), yakni target sasaran dinyatakan dengan jelas dan terukur;
- c. *Achievable* (dapat dicapai), yakni target sasaran dapat dicapai terkait dengan kapasitas dan sumber daya yang ada;
- d. *Relevant* (relevan), yakni mencerminkan keterkaitan antara target sasaran dengan tujuan;
- e. *TimeBound* (batas waktu), yakni periode pencapaian sasaran ditetapkan; dan
- f. *Continuouslyimprove* (perbaikan berkelanjutan), yakni sasaran dapat dicapai secara bertahap.

### **3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **A. Faktor-faktor yang membandingkan bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan**

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas program, agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah sangat cepat, maka suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil. Program Kerja dan Kegiatan Kecamatan Sedong mengacu kepada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Cirebon, Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel 4 terlampir.

Urusan Kewenangan Kantor Camat Sedong pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menjadi urusan wajib adalah :

1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
2. Kepemudaan dan Olahraga
3. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
4. Pemberdayaan Masyarakat Desa
5. Kependudukan

**B. Uraian Garis Besar mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan, antara lain meliputi:**

**I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**

**1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

**2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semestaran SKPD

**3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

- a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

**4. Administrasi Umum Perangkat Daerah**

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- f. Penyediaan Bahan/Material
- g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

**5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

**5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

- c. Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

## **II PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN**

### **1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

### **2 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**

Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

### **3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

## **III PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**

### **1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

## **IV PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

### **1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**

Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

### **2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada**

Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

## **V PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**

### **1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**

Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa

## **VI. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**

### **1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa

### **C. Tabel Rencana Program dan Kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel 3.1 yaitu sebagai berikut**

Tabel 3.1

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Sedong  
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025**

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Sedong

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun		Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025			
			Lokasi	Target Capaian		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Asal Ajuan	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0.	NON URUSAN				2.050.964.931,00				5.730.900.000
0.00.	NON BIDANG URUSAN				2.050.964.931,00				5.730.900.000
0.00.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Persentase Kepatuhan dalam Pelaksanaan SOP Pelayanan Pemerintah		100 Persen	2.050.964.931,00			100 Persen	5.730.900.000
0.00.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang di		6 Dokumen	3.570.400,00	PIS		6 Dokumen	68.000.000
0.00.01.2.01.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jl. Siliwangi No.01 (Desa Panongan - Kecamatan sedong)	2 Dokumen	1.759.400,00	PIS		2 Dokumen	10.000.000
0.00.01.2.01.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jl. Raya Siliwangi No.01 (Desa Panongan - Kecamatan sedong)	1 Dokumen	-			1 Dokumen	15.000.000
0.00.01.2.01.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jl. Siliwangi No.01 (Desa Panongan - Kecamatan sedong)	1 Dokumen	-			1 Dokumen	10.000.000
0.00.01.2.01.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jl. Siliwangi No.01 (Desa Panongan - Kecamatan sedong)	1 Dokumen	-			1 Dokumen	10.000.000
0.00.01.2.01.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jl. Siliwangi No.01 (Desa Panongan - Kecamatan sedong)	1 Dokumen	-			1 Dokumen	10.000.000
0.00.01.2.01.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Jl. Siliwangi No.01 (Desa Panongan - Kecamatan sedong)	5 Laporan	1.811.000,00	PIS		5 Laporan	13.000.000
0.00.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat	Jumlah laporan pengadministrasian keuangan		3 Jenis	1.761.867.200,00	PIS		3 Jenis	3.622.200.000
0.00.01.2.02.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	Kabupaten Cirebon	13 Orang/bulan	1.758.337.000,00	PIS		13 Orang/bulan	3.598.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Asal Ajuan		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0.00.01.2.06.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jl. Siliwangi No.01 (Desa Panongan - Kecamatan sedong)	12 Laporan	-			12 Laporan	16.700.000,00
0.00.01.2.06.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jl. Siliwangi No.01 (Desa Panongan - Kecamatan sedong)	48 Laporan	3.000.000,00	PIS		48 Laporan	18.000.000,00
0.00.01.2.07.000	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah barang milik daerah yang diadakan		4 Jenis	-	PIS		4 Jenis	890.000.000,00
0.00.01.2.07.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jl. Siliwangi No.01 (Desa Panongan - Kecamatan sedong)	2 Unit	-			2 Unit	200.000.000,00
0.00.01.2.07.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jl. Siliwangi No.01 (Desa Panongan - Kecamatan sedong)	2 Unit	-			2 Unit	90.000.000,00
0.00.01.2.07.000	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jl. Siliwangi No.01 (Desa Panongan - Kecamatan sedong)	2 Unit	-			2 Unit	100.000.000,00
0.00.01.2.07.001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kabupaten Cirebon	1 Unit	-			1 Unit	500.000.000,00
0.00.01.2.08.000	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan</b>	Jumlah Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah yang		4 Jenis	26.738.112,00	PIS		4 Jenis	75.000.000,00
0.00.01.2.08.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jl. Siliwangi No.01 (Desa Panongan - Kecamatan sedong)	1 Laporan	24.098.112,00	PIS		1 Laporan	60.000.000,00
0.00.01.2.08.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jl. Siliwangi No.01 (Desa Panongan - Kecamatan sedong)	10 Laporan	2.640.000,00	PIS		10 Laporan	15.000.000,00
0.00.01.2.09.000	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara		5 Dok	206.711.400,00	PIS		5 Dok	830.500.000,00
0.00.01.2.09.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jl. Siliwangi No.01 (Desa Panongan - Kecamatan sedong)	10 Unit	40.018.500,00	PIS		10 Unit	50.000.000,00
0.00.01.2.09.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jl. Siliwangi No.01 (Desa Panongan - Kecamatan sedong)	12 Unit	3.392.000,00	PIS		12 Unit	5.500.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Asal Ajuan		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0.00.01.2.02.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Sedong (Desa Panongan - Kecamatan sedong)	1 Laporan	1.753.600,00	PIS		1 Laporan	13.200.000
0.00.01.2.02.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Jl. Siliwangi No.01 (Desa Panongan - Kecamatan sedong)	18 Laporan	1.776.600,00	PIS		18 Laporan	11.000.000
0.00.01.2.03.	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		1 BA	-	PIS		1 BA	9.500.000
0.00.01.2.03.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan administrasi barang milik daerah tingkat kecamatan		7 Laporan	-	PIS		7 Laporan	-
0.00.01.2.05.	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Jumlah pegawai yang teradministrasi dengan baik	Kecamatan Sedong	1 Dokumen	-			1 Dokumen	9.500.000
0.00.01.2.05.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian Dinas beserta Atribut	Jl. Siliwangi No. 01 (Desa Panongan - Kecamatan sedong)	21 Orang	6.434.609,00	PIS		21 Orang	10.000.000
0.00.01.2.06.	<b>Administrasi Umum Perangkat</b>	Jumlah komponen penunjang kinerja pelayanan		8 Jenis	45.643.210,00	PIS		8 Jenis	215.700.000
0.00.01.2.06.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Sedong	6 Paket	941.400,00	PIS		6 Paket	25.000.000
0.00.01.2.06.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jl. Siliwangi No.01 (Desa Panongan - Kecamatan sedong)	12 Paket	22.045.710,00	PIS		12 Paket	100.000.000
0.00.01.2.06.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jl. Siliwangi No.01 (Desa Panongan - Kecamatan sedong)	12 Paket	2.000.000,00	PIS		12 Paket	12.000.000
0.00.01.2.06.000	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	Jl. Siliwangi No.01 (Desa Panongan - Kecamatan sedong)	12 Paket	2.400.000,00	PIS		12 Paket	14.000.000
0.00.01.2.06.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jl. Siliwangi No.01 (Desa Panongan - Kecamatan sedong)	2 Dokumen	3.900.000,00	PIS		2 Dokumen	10.000.000
0.00.01.2.06.000	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang	Jl. Siliwangi No.01 (Desa Panongan -	12 Paket	11.356.100,00	PIS		12 Paket	20.000.000

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Asal Ajuan		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0.00.01.2.09.000	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jl. Siliwangi No.01 (Desa Panongan - Kecamatan sedong)	6 Unit	-	-	-	6 Unit	25.000.000,00
0.00.01.2.09.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jl. Siliwangi No.01 (Desa Panongan - Kecamatan sedong)	1 Unit	163.300.900,00	PIK, PIS	-	1 Unit	400.000.000,00
0.00.01.2.09.001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Jl. Siliwangi No.01 (Desa Panongan - Kecamatan sedong)	1 Unit	-	-	-	1 Unit	350.000.000,00
0.00.01.2.11.1	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	1 BA	-	PIS	-	1 BA	10.000.000,00
0.00.01.2.11.000	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang	-(Desa Panongan - Kecamatan sedong)	2 Paket	-	-	-	2 Paket	10.000.000,00
7.	UNSUR KEWILAYAHAN				304.533.000,00				1.635.000.000,00
7.01.	KECAMATAN				304.533.000,00				1.635.000.000,00
7.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Peningkatan Pelimpahan Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		100 Persen	121.290.000,00			100 Persen	610.000.000,00
7.01.02.2.01.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat	Jumlah koordinasi penyelenggaraan pemerintah di tingkat kecamatan		2 Jenis	34.776.000,00	PIS		2 Jenis	135.000.000,00
7.01.02.2.01.000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi	Jl. Siliwangi No.01 (Desa Panongan - Kecamatan sedong)	2 Laporan	-			2 Laporan	50.000.000,00
7.01.02.2.01.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jl. Siliwangi No.01 (Desa Panongan - Kecamatan sedong)	12 Dokumen	34.776.000,00	PIS		12 Dokumen	85.000.000,00
7.01.02.2.02.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan kecamatan yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah.		3 Kegiatan	36.514.000,00	PIS		3 Kegiatan	170.000.000,00
7.01.02.2.02.000	Facilitasi Percepatan Pencapaian Standar	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jl. Siliwangi No.01 (Desa Panongan - Kecamatan sedong)	4 Laporan	-			4 Laporan	100.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Asal Ajuan	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.02.2.02.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jl. Siliwangi No.01 (Desa Panongan - Kecamatan sedong)	12 Laporan	36.514.000,00	PIS	(8)	12 Laporan	70.000.000,00
7.01.02.2.04.	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan</b>	Jumlah jenis urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat		3 Jenis	50.000.000,00	PIS		3 Jenis	305.000.000,00
7.01.02.2.04.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang	Jl. Siliwangi No.01 (Desa Panongan - Kecamatan sedong)	12 Dokumen	-			12 Dokumen	80.000.000,00
7.01.02.2.04.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Jl. Siliwangi No.01 (Desa Panongan - Kecamatan sedong)	4 Laporan	-			4 Laporan	55.000.000,00
7.01.02.2.04.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan	Jl. Siliwangi No.01 (Desa Panongan - Kecamatan sedong)	12 Laporan	50.000.000,00	PIS		12 Laporan	170.000.000,00
7.01.03.	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase jumlah Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan		100 Persen	88.050.000,00			100 Persen	205.000.000,00
7.01.03.2.01.	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan</b>	Jumlah jenis Koordinasi Kegiatan		3 Jenis	88.050.000,00	PIS		3 Jenis	205.000.000,00
7.01.03.2.01.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Jl. Siliwangi No.01 (Desa Panongan - Kecamatan sedong)	3 Lembaga Masyarakat	-			3 Lembaga Masyarakat	50.000.000,00
7.01.03.2.01.000	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jl. Siliwangi No.01 (Desa Panongan - Kecamatan sedong)	4 Dokumen	-			4 Dokumen	50.000.000,00
7.01.03.2.01.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jl. Siliwangi No.01 (Desa Panongan - Kecamatan sedong)	10 Laporan	88.050.000,00	PIK, PIS		10 Laporan	105.000.000,00
7.01.04.	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Persentase peningkatan kegiatan koordinasi untuk meningkatkan Ketenteraman dan ketertiban		100 Persen	93.093.000,00			100 Persen	130.000.000,00
7.01.04.2.01.	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Jumlah rapat koordinasi dalam penyelenggaraan		12 Laporan	50.000.000,00	PIS		12 Laporan	50.000.000,00
7.01.04.2.01.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di	Jl. Siliwangi No.01 (Desa Panongan - Kecamatan sedong)	4 Laporan	50.000.000,00	PIS		4 Laporan	50.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Asal Ajuan	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.04.2.02.	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	Jumlah Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala		12 Laporan	43.093.000,00	PIS		12 Laporan	80.000.000,00
7.01.04.2.02.000	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik	Jl. Siliwangi No.01 (Desa Panongan - Kecamatan sedong)	12 Laporan	43.093.000,00	PIS		12 Laporan	80.000.000,00
7.01.05.	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Persentase jumlah urusan pemerintahan umum yang di tugaskan kepala pemerintah daerah kepada camat		100 Persen	-			100 Persen	410.000.000,00
7.01.05.2.01.	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai</b>	Jumlah Jenis Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		8 Jenis	-	PIS		8 Jenis	410.000.000,00
7.01.05.2.01.000	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan	Jl. Siliwangi No.01 (Desa Panongan - Kecamatan sedong)	350 Orang	-			350 Orang	250.000.000,00
7.01.05.2.01.000	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jl. Siliwangi No.01 (Desa Panongan - Kecamatan sedong)	350 Orang	-			350 Orang	80.000.000,00
7.01.05.2.01.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jl. Siliwangi No.01 (Desa Panongan - Kecamatan sedong)	12 Dokumen	-			12 Dokumen	80.000.000,00
7.01.06.	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Peningkatan Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa		100 Persen	2.100.000,00			100 Persen	280.000.000,00
7.01.06.2.01.	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan</b>	Jumlah jenis Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang		18 Jenis	2.100.000,00	PIS		18 Jenis	280.000.000,00
7.01.06.2.01.000	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jl.Siliwangi No.01 (Desa Panongan - Kecamatan sedong)	1 Dokumen	-			1 Dokumen	10.000.000,00
7.01.06.2.01.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jl. Siliwangi No.01 (Desa Panongan - Kecamatan sedong)	1 Dokumen	-			1 Dokumen	10.000.000,00
7.01.06.2.01.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jl. Siliwangi No.01 (Desa Panongan - Kecamatan sedong)	10 Dokumen	-			10 Dokumen	120.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Asal Ajuan		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.06.2.01.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jl.Siliwangi No.01 (Desa Panongan - Kecamatan sedong)	4 Dokumen	-	-		4 Dokumen	10.000.000,00
7.01.06.2.01.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jl.Siliwangi No.01 (Desa Panongan - Kecamatan sedong)	4 Dokumen	-	-		4 Dokumen	10.000.000,00
7.01.06.2.01.000	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jl. Siliwangi No.01 (Desa Panongan - Kecamatan sedong)	10 Dokumen	-	-		10 Dokumen	10.000.000,00
7.01.06.2.01.000	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jl. Siliwangi No.01 (Desa Panongan - Kecamatan sedong)	10 Dokumen	-	-		10 Dokumen	10.000.000,00
7.01.06.2.01.001	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jl. Siliwangi No.01 (Desa Panongan - Kecamatan sedong)	10 Dokumen	-	-		10 Dokumen	10.000.000,00
7.01.06.2.01.001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jl.Siliwangi No.01 (Desa Panongan - Kecamatan sedong)	10 Dokumen	-	-		10 Dokumen	10.000.000,00
7.01.06.2.01.001	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jl.Siliwangi No.01 (Desa Panongan - Kecamatan sedong)	4 Dokumen	-	-		4 Dokumen	10.000.000,00
7.01.06.2.01.001	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kecamatan Sedong (Desa Panongan - Kecamatan sedong)	12 Dokumen	2.100.000,00	PIS		12 Dokumen	50.000.000,00
7.01.06.2.01.001	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jl. Siliwangi No.01 (Desa Panongan - Kecamatan sedong)	10 Laporan	-	-		10 Laporan	10.000.000,00
7.01.06.2.01.001	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	(Desa Panongan - Kecamatan sedong)	4 Laporan	-	-		4 Laporan	10.000.000,00
<b>J U M L A H</b>					<b>2.355.497.931,00</b>				<b>7.365.900.000,00</b>

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN SEDONG

Rencana program dan kegiatan daerah yang dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) SKPD untuk diarahkan dalam pencapaian sasaran dan target pembangunan yang belum dapat dicapai.

Rincian rencana program Kegiatan, dan Sub kegiatan Kecamatan Sedong tahun 2024 sebagai berikut :

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)
<b>0.</b>	<b>NON URUSAN</b>	
<b>0.00.</b>	<b>NON BIDANG URUSAN</b>	
<b>0.00.01.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	
<b>0.00.01.2.01.</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	
0.00.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.759.400,-
0.00.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.811.000,-
<b>0.00.01.2.02.</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat</b>	
0.00.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.761.867.200,-
0.00.01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.753.600,-
0.00.01.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1,776.600,-
<b>0.00.01.2.05.</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	
0.00.01.2.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	6.434.609,-
<b>0.00.01.2.06.</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat</b>	
0.00.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	941.400,-
0.00.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.045.710,-
0.00.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.000.000,-
0.00.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.400.000,-
0.00.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.900.000,-
0.00.01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	11.356.100,-

0.00.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.000.000,-
<b>0.00.01.2.08.</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
0.00.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.098.112
0.00.01.2.08.03.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.640.000,-
<b>0.00.01.2.09.</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
0.00.01.2.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.018.500
0.00.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.392.000
0.00.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	163.300.900,-
<b>7.</b>	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>	
<b>7.01.</b>	<b>KECAMATAN</b>	
<b>7.01.02.</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN</b>	
<b>7.01.02.2.01.</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	
7.01.02.2.01.02.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	34.776.000,-
<b>7.01.02.2.02.</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	
7.01.02.2.02.03.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah	36.514.000,-
<b>7.01.02.2.04.</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat</b>	
7.01.02.2.04.03.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	50.000.000,-
<b>7.01.03.</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA</b>	
<b>7.01.03.2.01.</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	
7.01.03.2.01.03.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	88.050.000,-
<b>7.01.04.</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	
<b>7.01.04.2.01.</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan</b>	
7.01.04.2.01.01.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah	50.000.000,-

<b>7.01.04.2.02.</b>	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	
7.01.04.2.02.01.	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara	43.093.000,-
<b>7.01.06.</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	
<b>7.01.06.2.01.</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	
7.01.06.2.01.16.	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	2.100.000,-
	<b>JUMLAH</b>	<b>2.355.497.931,-</b>

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Rencana kerja merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja. Perencanaan kerja merupakan acuan tugas pokok dan fungsi pada Kecamatan Sedong di masa yang akan datang secara terencana dan terkoordinasi. Dengan demikian akan tercipta keinginan untuk meningkatkan kinerja dan fokus perbaikan di masa yang akan datang. Pelaksanaan pembangunan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kehidupan Masyarakat dalam wilayah kecamatan memerlukan perhatian khusus dari semua pihak yang terkait dengan persepsi yang sama, agar dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Masyarakat juga dilibatkan dalam pengawasan dan pemeliharaan setiap kegiatan pembangunan agar dapat berdaya guna sesuai yang direncanakan. Kecamatan Sedong sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Cirebon, akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Untuk mendukung hal tersebut, Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program dan kegiatan tahun 2024. Rencana Kerja Kecamatan Sedong yang telah disusun ini merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Sedong demi terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan mengingat hal-hal sebagai berikut :

- a. Sebagai catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada tahun anggaran 2023 Kecamatan Sedong menganggarkan rehabilitasi gedung kantor dengan fokus atap sebanyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan tidak menyentuh kusen dan jendela yang mulai lapuk dan rapuh.

Pada tahun anggaran 2024 melalui Pagu Indikatif Sektoral (PIS) meminta penganggaran untuk rehabilitasi kusen dan jendela sebanyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan ditambah dana Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK) menganggarkan sebanyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Peningkatan fasilitas sarana layanan Publik (Kecamatan Penerima Insentif Desa Mandiri)

sebanyak 4 (empat) desa yang peruntukannya untuk Peningkatan Fasilitas Sarana Pelayanan Publik di Kecamatan.

- b. Kaidah – kaidah pelaksanaan Dengan disusunnya Rencana Kerja ini, Kecamatan Sedong telah mempersiapkan diri untuk melaksanakan kegiatan dengan terencana dan terkoordinasi, dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada Tahun 2024, dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.
- c. Rencana Kerja Kecamatan Sedong ini sebagai Bahan RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2024 yang merupakan bahan penetapan KUA PPAS Tahun 2024 yang selanjutnya sebagai bahan penyusunan RKA Tahun 2024 yang terencana dan terkoordinasi, dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada Tahun 2024, dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Demikian Rencana Kerja ini kami susun semoga dapat bermanfaat.



Diundangkan di Sumber  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR